



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

**Setia Neo Liberty
NIM 090810101131**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

1. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang kuaplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini;
2. Kakakku Kharisma Eva Roslia dan Andreas Henry Prasetyo terima kasih atas doa, dan motivasi yang telah diberikan untuk penulis selama ini;
3. Yang spesial penuh cinta dan kasih untuk Leonardo Jeffry A. B ku. Terima kasih atas motivasinya ya. Terimakasih atas nasehat yang diberikan. Yang terpenting terima kasih sudah ngasi cinta kasih tulusnya;
4. Untuk yang kusayangi dan yang kuhormati para dosenku, dosen pembimbingku Bapak Rafael Purtomo yang selalu setia membimbing dan meluangkan waktunya terima kasih sebesar-besarnya dan Bu Siti Komariah yang slalu menyempatkan waktu untuk penulis, terima kasih Ibu. Jasa-jasa bapak ibu akan penulis kenang sampai nanti Tuhan yang membalas semua;
5. Almamaterku tercinta : SD Dabasah 07, SMPK Indra Prasta, SMAN 1 TENGGARANG dan FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER.

MOTTO

Manusia tidak merancang untuk gagal.

Mereka gagal untuk merancang

(William J.Siegel)

**Jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut anda baik,
Tetapi mintalah kepada-Nya apa yang menurut Dia baik bagi anda**

(Antonim)

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok,

Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri.

Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari

(Matius 6:34)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI

SURAT PERNYATAAN

Nama : Setia Neo Liberty
NIM : 090810101131
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Reklame Di Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2013

Yang menyatakan,

Setia Neo Liberty

NIM 090810101131

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Setia Neo Liberty
NIM 090810101131

Pembimbing :

Dosen pembimbing utama	: Dr. Rafael Purtomo S.M.Si
Dosen pembimbing anggota	: Dr. Siti Komariah, M.Si

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN JEMBER

Nama Mahasiswa : Setia Neo Liberty
NIM : 090810101131
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 20 Juni 2013

Pembimbing I,

Dr. Rafel Purtomo S.M.Si
NIP 19581024198803001

Pembimbing II,

Dr. Siti Komariah, M.Si
NIP. 197106102001122002

Ketua Jurusan IESP

Dr. I Wayan Subagiarta, SE, M.Si
NIP 19600412 198702 1 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Setia Neo Liberty

NIM : 090810101131

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal :

.....
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : : (.....)

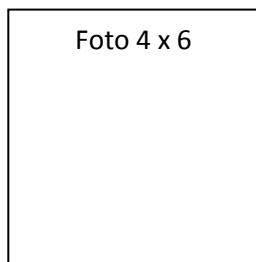
NIP:

Sekretaris : : (.....)

NIP:

Anggota : : (.....)

NIP:



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

NIP. 19630614 199002 1 000

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN JEMBER

Setia Neo Liberty

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Jember. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Jember, khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS), jenis data yang digunakan Data sekunder meliputi PDRB tahun 2000-2011, data jumlah penduduk tahun 2000-2011, data jumlah industri tahun 2000-2011.

Hasil regresi secara parsial melalui uji t memperoleh hasil bahwa Pengaruh variabel jumlah penduduk(X_1) mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember dilihat dari hasil regresi sebesar 7.130 dan probabilitas sebesar 0.802. Sedangkan Pengaruh variabel jumlah industri(X_2) terhadap penerimaan Pajak Reklame (Y) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember hasil regresi sebesar 0.002 dan probabilitas hitung 0.044, dan Pengaruh variabel penerimaan PDRB (X_4) terhadap penerimaan Pajak Reklame (Y) pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember Hasil Regresi sebesar 4.73006 dan nilai probabilitas hitung sebesar 0.020. Sedangkan hasil R^2 sebesar 0.541 hal ini berarti 54.1% perubahan penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, jumlah industri, dan penerimaan PDRB sedangkan sisanya sebesar 49.9% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi.

kata kunci : Pajak Reklame, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, PDRB dan Kabupaten Jember.

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAX RECEIPT ADVERTISING IN THE
DISTRICT JEMBER*

Setia Neo Liberty

Department of Economics and Development Studies

Faculty of Economics University of Jember.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of Total Population, Number of Industry, and the GDP of the advertisement tax revenue in the city of Jember. The results of this study are expected to provide input for the benefit and the Local Government of Jember, especially the Office of Financial Management. Regression model used is multiple linear regression (Multiple Linear Regression Method) by the method of least squares or ordinary least squares (OLS), the type of data used secondary data covering GDP in 2000-2011, the population data from 2000 to 2011, data on the industry years 2000-2011.

Partial regression results through the t test to obtain the result that the effect of variable population (X1) has a positive effect but not significant to the advertisement tax revenue in Jember seen from the regression results for 7130 and the probability is 0.802. While the effect of a variable number of industries (X2) against Advertisement Tax revenue (Y) and a significant positive effect on the acceptance of advertisement tax in Jember regression results for 0002 and 0044 probabilitas count, and admission variables influence GDP (X4) against Advertisement Tax revenue (Y) positive and significant impact on acceptance of advertisement tax in Jember Regression Results of 4.73006 and probabilitas count value of 0.020. While the results of R^2 of 0541 this means that 54.1% Advertising Tax revenue changes are influenced by variable number of residents, number of industries, and the acceptance of GDP while the remaining 49.9% were caused by other factors not included in the regression equations.

keywords: Advertisement Tax, Total Population, Total Industry, GDP and Jember.

PRAKATA

Terimakasih Jesus Christ yang telah memberikan Berkah yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember* ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rafael Purtomo S.M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik,trimakasih yang sebesar-besarnya bapak;
2. Dr. Siti Komariah,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan segenap kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, memberikan informasi, saran, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan;
4. Dr. M. Fathorrazi, SE.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Keluarga Besarku tercinta Ayahanda Muryo Djajadi, Ibunda Siwi Astuti, Kakakku Kharisma Eva Roslia terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
7. Leonardo Jeffry A.B terimakasih telah setia dan sabar menemani serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dengan kasih sayangnya;

8. Saudara KKN di Desa Tegalwangi Kak Andreas Henry Prasetyo, Kak Umi Agustin, Kak Gita Purnama Dewi, Kak Gizma Pristy, Kak Ido Fiskal, Kak Rizky Dan Kak Bezta Putra, kalian sungguh saudara yang luar biasa, akan merindukan kalian semua;
9. Sahabat Karib yang slalu setia yang slalu memberikan motivasi trimakasih yang tak terhingga dimana disaat tak tahu arah kalian slalu menemani trimakasih kepada Merryana Mega, Retta Sinaga, Ani Komariah, Yuzron Hadi, M. Badrus, Nanik Safitri, Lailatul Holidayah, Willi, Isnin Nurly, Titis , Kiki Ayu, Lisa, Niken Ayu, Weni, Kholifatus Zahro. Maaf gak bisa di sebut satu satu;
10. Kawan-kawan kost di Kalimantan No 39 yang slalu menghibur setia menemani malam-malam yang panjang bakal merindukan kalian semuanya trimakasih atas kekompakannya;
11. Sahabat dan teman-teman di GKJW Surabaya trimakasih untuk doa kalian;
12. Ajeng S.E terimakasih atas saran dan kritiknya;
13. Segenap Keluarga Kelompok Studi Konsentrasi Ekonomi Regional dan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas segala kesempatan terbaik yang penuh makna;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI :

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PESEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak	12
2.1.3 Pengelompokan Pajak	13
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.5 Pajak Daerah	16

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah	16
2.1.5.2 Tolak Ukur Untuk Menilai Hasil Pajak Daerah	19
2.1.5.3 Tolak Ukur Untuk Menilai Potensi Pajak Daerah	20
2.1.5.4 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	21
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.6.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah	22
2.1.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
2.1.7 Pajak Reklame	24
2.1.7.1 Pengertian Pajak Reklame	24
2.1.7.2 Dasar Hukum Pajak Reklame	25
2.1.7.3 Jenis-Jenis Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame	26
2.1.8 Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Pajak Reklame	29
2.1.9 Hubungan Antara Industri Makanan, Minuman dengan Pajak Reklame	29
2.1.10 Hubungan Antara Pajak Reklame dengan Pajak Reklame	30
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	30
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis	33
BAB 3. METODE PENELITIAN	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.2.1 Jenis data	34
3.2.2 Sumber Data	34
3.3 Metode Pengumpulan Data	35
3.4 Metode Analisis	35
3.4.1 Alat Analisis	35

3.4.2 Uji Statistik	36
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	39
3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum	43
4.1.2 Penduduk	44
4.1.3 Jumlah Industri	45
4.2 Statistik Deskriptif	49
4.3 Analisis Data	49
4.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	49
4.3.2 Pengujian Statistik	51
4.4 Uji Asumsi Klasik	52
4.5 Pembahasan	55
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
Daftar Pustaka	60
Lampiran-Lampiran	63



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

**Setia Neo Liberty
NIM 090810101131**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan PDRB. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan baru ini dinilai dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan bagi pemerintah daerah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Alasan yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah tidak meratanya pembangunan di daerah selama ini menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu terdapat campur tangan pemerintah pusat di masa lalu yang mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal (Suparmoko, 2009:18).

Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya (Kuncoro, 2004:47). Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Peningkatan PAD merupakan suatu usaha daerah yang digunakan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah atas pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian keuangan utama bagi pemerintah daerah

yang perlu terus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan lancar sehingga daerah secara bertahap dan berangsur-angsur dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta dapat menjadi daerah mandiri yang mampu untuk membiayai pembangunan daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Teori Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Produk Domestik Regional Bruto dapat meningkat apabila investasi di daerah tersebut meningkat, investasi akan meningkat jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan investasi maka dibutuhkan dana untuk membiayai pembangunan yang dipungut dari pajak dan non pajak. Dengan demikian keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah akan dapat meningkatkan PDRB (Sukirno, 1994:456).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Jaka Sriyana, 1999:4).

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat membiayai pembangunan. Dengan meningkatkan penerimaan daerah akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah dan akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman luar negeri. Untuk lebih

meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak daerah melalui upaya mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak daerah.

Kabupaten Jember merupakan pusat pertumbuhan di Karesidenan Besuki. Sebagai kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan di Karesidenan Besuki, tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan PDRB dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Tahun 2000-2011

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi	PDRB
2000	-	4.675.233
2001	9,03%	5.139.520
2002	13,52%	5.943.201
2003	1,34%	6.023.671
2004	19,97%	7.526.427
2005	1,29%	7.624.947
2006	12,42%	8.705.996
2007	5,64%	9.226.768
2008	5,69%	9.783.828
2009	5,26%	10.326.736
2010	5,23%	10.896.344
2011	5,78%	11.564.214

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dalam 12 tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember naik dari 1,34 % menjadi 19,97 % di tahun 2004, dan di tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember turun dari 12,42% menjadi 5,64% di tahun 2007 akibat krisis moneter. Keberhasilan otonomi daerah juga dapat dilihat dari penerimaan daerah yang terus meningkat khususnya dari pajak daerah. Dengan meningkatkan penerimaan daerah, akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah dan memperkecil transfer dana dari pemerintah pusat atau pinjaman luar negeri, untuk dapat meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan daerah, maka akan terus ditingkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui upaya mengefisiensikan pemungutannya. Dengan adanya

kontribusi pajak-pajak daerah di Kabupaten Jember maka dapat dilakukan pemungutan secara efisiensi, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam membangun pembangunan daerah yang merata khususnya di Kabupaten Jember.

Sesuai dengan prinsip kebijakan ekonomi daerah yang mengutamakan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan dan kewenangannya, diupayakan agar PAD menjadi andalan APBD Kabupaten Jember. Secara umum ada empat komponen dalam PAD yaitu pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling utama. Persentasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai 75% dari total PAD Kabupaten Jember.

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Jember dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah penduduk Kabupaten Jember 2000-2011

TAHUN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	PDK
2000	-	1.945.002
2001	8,26%	2.120.074
2002	0,18%	2.123.968
2003	0,34%	2.131.289
2004	0,27%	2.136.999
2005	0,21%	2.141.467
2006	0,24%	2.146.571
2007	0,34%	2.153.883
2008	0,68%	2.168.732
2009	0,51%	2.179.829
2010	3,77%	2.265.133
2011	22,73%	2.931.546

Sumber : BPS Kab.Jember

Tabel 1.2 menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2000-2011 mengalami peningkatan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Jember selalu mengalami peningkatan.

Syuhada Sofian (1997:21) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1996:42). Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga banyaknya jumlah industri yang ada, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993:12).

Menurut Sunarko (2005:12) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, sedang, maupun besar yang ada di Kabupaten Jember. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi.

Menurut J Supranto (1996:20), jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan objek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat.

Di Kabupaten Jember yang disebut juga kota pelajar, banyak sekali iklan-iklan reklame dalam menarik perhatian mahasiswa ataupun masyarakat. Iklan yang diberikan biasanya makanan dan minuman yang berada di lingkungan kampus. Jika dilihat dari Data yang ada, industri di Jember semakin tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 1.3. Jumlah industri Makanan dan Minuman Kabupaten Jember

TAHUN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	ID
2000	-	9.654
2001	10,54%	10.791
2002	59,83%	26.862
2003	0,53%	27.004
2004	0,41%	27.115
2005	2,55%	27.825
2006	-149,98%	11.131
2007	9,09%	12.244
2008	21,31%	15.559
2009	1,85%	15.853
2010	2,03%	16.182
2011	4,39%	16.925

Sumber : BPS Kabupaten Jember, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa realisasi jumlah industri makanan dan minuman Kabupaten Jember dari tahun 2000-2011 mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2006 realisasi jumlah industri besar dan sedang mengalami penurunan.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh BPS terhadap suatu daerah (BPS, 2004). Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Davey, K.J 1999:32).

Sedangkan PDRB perkapita adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Karena pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah maka semakin tinggi PDRB akan semakin tinggi

penerimaan Pajak Daerah pada umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya (Arsyad 1999:45).

Sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara, pajak memiliki peran penting bagi pembangunan, dengan pajak pemerintah dapat membiayai pembangunan secara mandiri karena pajak dipungut dari masyarakat. Sebagai elemen dari kebijakan pemerintah, pajak akan mempengaruhi perekonomian, ketika pajak dikenakan atas setiap individu, secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat berupa penurunan pendapatan. Begitu juga jika pajak dikenakan kepada pengusaha, akan berdampak langsung pada keputusan menaikkan harga barang yang diproduksi, sehingga mempengaruhi produksi dan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha (Mardiasmo, 2003:54).

Menurut Sutrisno (2002;15) menyebutkan bahwa bertambah atau berkurangnya pendapatan perorangan serta pendapatan perusahaan, juga mempengaruhi besar kecilnya jumlah pendapatan pajak yang diterima pemerintah. Selain itu, sistem perpajakan yang menetapkan pajak dengan jumlah besar akan mempengaruhi keputusan pengusaha untuk berinvestasi. Dari asumsi ini dapat dilihat apakah jumlah industri di Kabupaten Jember berpengaruh positif.

Pajak daerah dikatakan tinggi apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB sering digunakan untuk melihat tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu Negara atau daerah. Dengan semakin tingginya PDRB di suatu daerah maka menunjukkan tingkat kemakmuran dan pembangunan yang tinggi pula. Sehingga dengan meningkatnya kemakmuran dan pembangunan yang ada, akan mendorong peningkatan reklame di daerah tersebut, ini berarti dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame (Arsyad 1999:43)

1.1.1 Rumusan Masalah

Pemerintah Kabupaten Jember sedang melakukan proses pembangunan yang memerlukan biaya yang relatif besar. Pajak reklame merupakan salah satu

sumber pendorong dalam mengembangkan pembangunan. Yang paling pesat pada reklamenya saat Kabupaten Jember melakukan Bulan Program berkunjung ke Jember dimana, reklame-reklame bermunculan dan pembangunan juga pesat, pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut. Disamping itu partisipasi dan peran serta masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pajak reklame khususnya wajib pajak reklame.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah adanya potensi pajak reklame yang belum digunakan secara maksimal. Pajak reklame merupakan salah satu Pajak Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi mengenai hubungan terhadap jumlah penduduk, jumlah industri dan penerimaan pajak reklame 2000-2011 di Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember?
2. bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember?
3. bagaimana pengaruh penerimaan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember?

1.2 Tujuan Penelitian dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. mengetahui berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember;
- b. mengetahui berapa besar pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember;

- c. mengetahui berapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember;

1.2.2 Manfaat

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :

- a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Jember, khususnya Pajak Reklame.
- b. Bagi Masyarakat
Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.
- c. Bagi Pemerintah
 - 1) Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak Reklame Kabupaten Jember.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.
- d. Bagi Akademi / Pendidikan
Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (dalam Thomas Sumarsan, 2010 : 3)
- b. Menurut Rachmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (dalam Mardiasmo, 2003 : 1)
- c. Menurut Sommerfeld Ray M, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (dalam Muqodim, 1999 : 1)

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- b. Berdasarkan Undang Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus digunakan untuk "*public saving*" dan public saving ini yang akan digunakan untuk membiayai "*public investment*".

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Ghofir, 2000:12).

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam

penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2007:4).

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut Munawar (2001:13) secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara yaitu:

- a. Untuk membatasi konsumsi dengan demikian dapat mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
- f. Untuk mobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1986:20) didasarkan pada:

- a. Prinsip kesamaan / keadilan (*equity*)
Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Prinsip kepastian (*certainty*)
Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.
- c. Prinsip kecocokan / kelayakan (*convencien*)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

d. Prinsip Ekonomi (*economy*)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Fungsi Pajak dilihat dari pemungutannya mempunyai tiga fungsi:

a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

c. Fungsi Regulerend

Atau fungsi mengatur dan sebagainya fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari hasil fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:24) dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula.

Berikut adalah penggolongan pajak:

a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Subjektif

Adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat atau Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada

umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

- a) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jenderal pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
- b) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
- c) Pajak yang dikelola direktorat jenderal bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.

2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

Dilihat dari sifatnya dan lembaga pemungutnya, Pajak Reklame termasuk pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajak daerah. Argumennya adalah karena obyek pajaknya, penyelenggaraan reklame dan lokasi reklame berada di daerah yang bersangkutan. Orang yang menyelenggarakan reklame secara jelas mengambil keuntungan darinya dan eksternalitas yang mungkin timbul secara jelas mengenai lingkungan sosial dalam alam di wilayah daerah tersebut.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Waluyo dan Wirawan (2007:15) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

b. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

c. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.1.5 Pajak daerah

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Rochmad dalam Kaho (2001: 9) pajak daerah adalah pajak lokal yang dipungut oleh daerah swantara, seperti provinsi, kotapraja dan Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU 34/2000), Pasal 1 angka 6, dapat dijelaskan sebagai berikut “*Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah*”.

Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan pajak dan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum disahkan menjadi peraturan daerah tentang

pajak daerah, pemerintah daerah harus memberitahukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada objek pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Dari definisi dan penjelasan tentang pajak daerah sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pajak daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- b. Penyerahan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang
- c. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat.
- d. Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak Daerah tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- b. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan per Undang-Undangan. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel dan Restoran

Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Menurut peraturan daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang dimaksud dengan Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang atau pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran, sedangkan obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Besarnya tarif pajak adalah adalah 10% dari jumlah pembayaran.

b. Pajak Hiburan

Adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pajak Hiburan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan dan objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan hiburan.

c. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan obyek pajak ini

adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

d. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 12 Tahun 2001. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik.

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 1998. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C, sedangkan obyek pajak ini adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

2.1.5.2 Tolak Ukur Untuk Menilai Hasil Pajak Daerah

Menurut Davey (1988:11), ada tiga tolak ukur yang dikenal untuk menilai hasil pajak daerah yaitu upaya pajak, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*).

a. Upaya Pajak

Pengukuran yang lazim digunakan adalah dengan membandingkan hasil pajak dengan kemampuan pajak yang diwakili PDRB. Semakin besar nilainya maka akan semakin baik karena menggambarkan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Guna (*effectiveness*)

Hasil guna adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan semua wajib pajak

membayar pajak masing–masing. Hasil guna yang baik berkisar diatas angka 60 persen dari potensi pajaknya. Terdapat tiga faktor yang mengancam hasil guna yaitu menghindari pajak (oleh wajib pajak) kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang dan penipuan oleh petugas pajak.

c. Daya Guna (*efficiency*)

Yaitu perbandingan antara biaya pungut dengan potensi yang bersangkutan, dengan anggapan semua wajib pajak terhutang masing-masing. Biaya yang dimaksud adalah biaya pungut berkisar antara 40-80 persen dari total penerimaan.

2.1.5.3 Tolak Ukur Untuk Menilai Potensi Pajak Daerah

Menurut Devas (1989:14), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga–harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- 1) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
- 2) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan–perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP).

b. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing–masing golongan.

c. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

d. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan strukturtarif, memutuskan siapa yang harus dibayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.5.4 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu :

- 1) Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat indonesia seluruhnya.
- 2) Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*).

- 4) Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
- 5) Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensipotensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.6.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003:30) yaitu :

a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal.

Disamping asas-asas berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman kejaman yaitu:

a. Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b. Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetap karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

c. Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepadanegara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

2.1.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuanganyasendiri berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

a. Pajak Daerah

- b. Retribusi Daerah
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
- d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
- e. Penerimaan Lain-Lain

2.1.7 Pajak Reklame

2.1.7.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Bagian laba BUMD
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan keuangan pusat – daerah
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah Yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh negara. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame. Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun

1997 yang diperbaharui dengan UU No 34 tahun 2000. Pembaharuan Undang-Undang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, (Marihot P. Siahaan, 2005) dan juga untuk memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan (Marihot P. Siahaan, 2005:43).

2.1.7.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pajak Reklame. Asas yang mendasari penagihan dan pembebanan Pajak Reklame menurut Mardiasmo (2003:34) meliputi:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda.

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah Kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Pembaharuan Undang-Undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah yang umumnya dan pajak reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.

Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, media yang menurut bentuk dan corak ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang dan jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.1.7.3 Jenis-jenis Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame (Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame) adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Reklame Papan/Billboard

yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

b. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)

yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

c. Reklame Kain

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

d. Reklame Melekat (Stiker/Poster)

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

e. Reklame Selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame Berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame Udara

yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame Suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

i. Reklame Film/Slide

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

j. Reklame Peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Semua reklame yang termasuk dalam kategori di atas adalah objek pajak reklame. Prinsip Pajak Reklame mencerminkan keadilan ditunjukkan oleh pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena secara teoritis harus mempertimbangkan Overhead ekonomi (M.L Jhingan, 2000:21). Menurut DPKD Kabupaten Jember pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak antara lain:

- a. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

- c. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- d. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukkan yang sedang atau akan diselenggarakan.
- e. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-Badan yang dimaksud.
- f. Penyelenggaran oleh organisasi politik atau organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai politik.

Ditinjau dari obyek pajak, subyek pajak, wajib pajak dan dasar pengenaan pajak reklame menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 adalah :

No	Keterangan	Pajak reklame
1.	Objek Pajak	Semua penyelenggaraan reklame
2.	Subjek Pajak	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame
3.	Wajib Pajak	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame
4.	Dasar pengenaan pajak	Nilai sewa reklame (NSR)

Sumber: Mariot P.Siahaan,2005

Menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 tentang pajak reklame juga disebutkan, pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Adapun yang dimaksud reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau daerah kota seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang

akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

2.1.8 Hubungan Antara jumlah penduduk dengan Pajak Reklame

Penduduk melakukan permintaan atas barang dan jasa dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup masyarakat. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka kebutuhan akan barang dan jasa juga akan meningkat, produksi industri juga akan meningkat, dengan seiring meningkatnya banyaknya permintaan maka jumlah faktor industri juga akan meningkat, lapangan pekerjaan grafiknya akan naik.

Menurut Mariot, (2005:41), penduduk merupakan salah satu faktor yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Jember yang mulai menunjukkan pertumbuhannya, banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari produksi inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula ekonomi secara keseluruhan bukan pada pendapatan daerah saja namun pendapatan pemerintah juga harus dikembangkan, dengan adanya jumlah penduduk yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik, jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah.

2.1.9 Hubungan Antara Industri Makanan, Minuman dengan Pajak Reklame

Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah maupun industri besar. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sutrisno (2002:47) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh devas, dkk (1989), bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/kota) menarik pajak atas

benda papan reklame di daerah. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga sangat berpengaruh dengan pendapatan PDRB, hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan suatu memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat, hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan objek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat.

2.1.10 Hubungan Antara PDRB dengan Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

Produk Domestik regional bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik perkapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan. Atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993;27).

2.2 Tinjauan Penelitian sebelumnya

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang penelitian pajak Reklame yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran

penelitian terdahulu maka akan dapat dipastikan ruang yang didapat oleh penelitian ini.

Beberapa penelitian mengenai Pajak Reklame telah banyak dilakukan, antara lain :

- a. Rizki Yulianto (2006) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang”** dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Persamaan regresi melibatkan dua variabel atau lebih. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kota Semarang.
- b. Akhmad Rusyadi (2005) mengadakan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes”** dengan menggunakan alat analisis trend linier dengan metode *least square*. Analisis ini digunakan untuk meramalkan penerimaan pajak reklame di tahun-tahun mendatang. Penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan, sehingga pajak reklame perlu mendapatkan pengelolaan yang serius untuk memaksimalkan penerimaannya.
- c. Widodo (2011) mengadakan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember”** dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Persamaan regresi melibatkan dua variabel atau lebih. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kota Jember

Tabel 2.1. Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variable	Alat analisis
1	Rizki Yulianto (2006)	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota	Obyek Reklame Papan Reklame Multivision dan billboard, PDRB per kapita, Jumlah	alat analisis regresi berganda

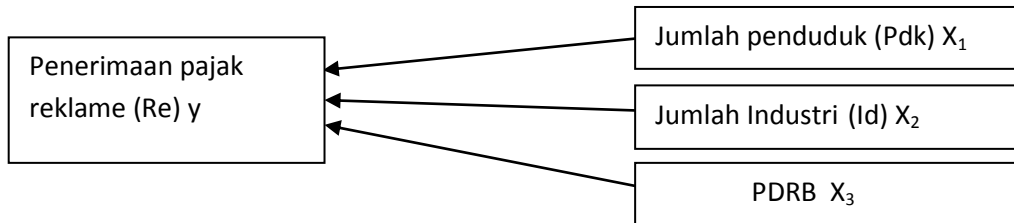
		Semarang”	Industri, Jumlah Penduduk.	
2	Akhmad Rusyadi (2005)	“Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes”	PAD, Prospek Penerimaan Pajak Reklame	alat analisis trend linier dengan metode <i>least square</i>
3	Widodo (2011)	“Pengaruh pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB	Regresi linier Berganda

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang merupakan perolehan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pajak Reklame. Pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sumber penerimaan yang potensial. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah senantiasa berusaha menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di daerahnya.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti yaitu jumlah Penduduk, jumlah industri dan PDRB yang diduga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu uji statistik untuk menguji dan menganalisis apakah benar-benar variabel tersebut mempunyai peningkatan atau penurunan terhadap Pajak Reklame. Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL



2.4 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PDRB di Kabupaten Jember;
- jumlah Industri Makanan dan Minuman berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penerimaan PDRB di Kabupaten Jember;
- penerimaan pajak reklame mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PDRB di Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Dimana dalam skripsi ini menjelaskan sebab-akibat antara variable terikat dengan variable bebas. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable-variable yang diteliti serta hubungan antara satu variable dengan variable lainnya (Sugiono,2005 :10-11)

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian secara periode tertentu. Data sekunder meliputi PDRB tahun 2000-2011, data jumlah penduduk tahun 2000-2011, data jumlah industri tahun 2000-2011

Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian di Kabupaten Jember.

3.2.2 Sumber Data

Sedangkan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.
- b. Dinas pendapatan. Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jember.
- c. Dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/ data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/ kantor/ instansi atau lembaga terkait (Suharsimi Arikunto, 2002:34). Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang menyangkut jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Alat Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999:23).

Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$Re = f(\text{pdrb}, \text{id}, \text{pdk})$$

$$Re = \alpha + \beta_1 \text{pdrb} + \beta_2 \text{id} + \beta_3 \text{pdk} + e$$

$$\text{LogRe} = \alpha + \beta_1 \text{Logpdrb} + \beta_2 \text{Logid} + \beta_3 \text{Logpdk} + e$$

Dimana:

Pdrb = PDRB Kabupaten Jember

pdk = Jumlah penduduk (dalam jiwa) Kabupaten Jember

id = jumlah industri Kabupaten jember

Re = Penerimaan pajak reklame Kabupaten Jember

e = Tern Error

Log = Logaritma

3.4.2 Uji Statistik

Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H₀ : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

H₁ : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F Tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{1-R^2}{n-k}}$$

Dimana :

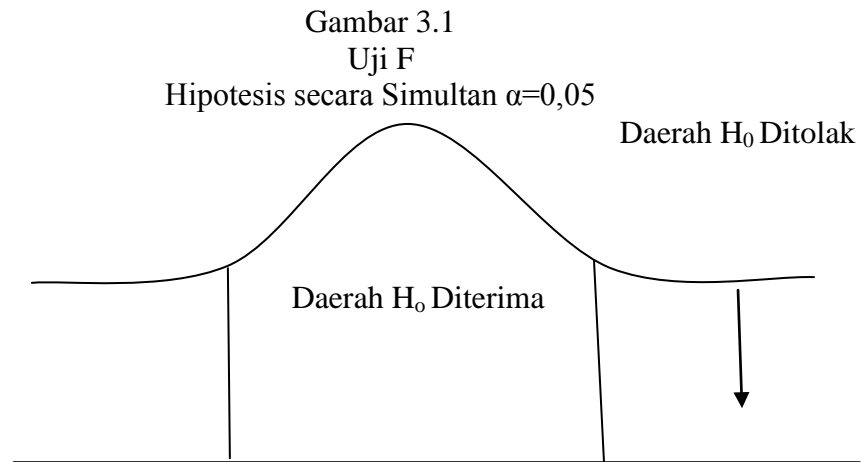
R^2 : Koefisien determinasi

K : Jumlah variable independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung > F Tabel maka H₀ ditolak dan menerima H₁. Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila, F hitung < FTabel maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F Tabel dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:



Sumber : J. Supranto, 1996

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabelindependen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

- 1) $H_0 : \beta_1 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk secara individu terhadap variabel pajak reklame.
 $H_1 : \beta_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jumlah penduduk secara individu terhadap variabel pajak reklame.
- 2) $H_0 : \beta_2 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah industri secara individu terhadap variabel pajak reklame.
 $H_1 : \beta_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jumlah industri secara individu terhadap variabel pajak reklame.
- 3) $H_0 : \beta_3 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel PDRB secara individu terhadap variabel pajak reklame.
 $H_1 : \beta_3 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel PDRB secara individu terhadap variabel pajak reklame.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, dimana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_j}{Se(b_j)}$$

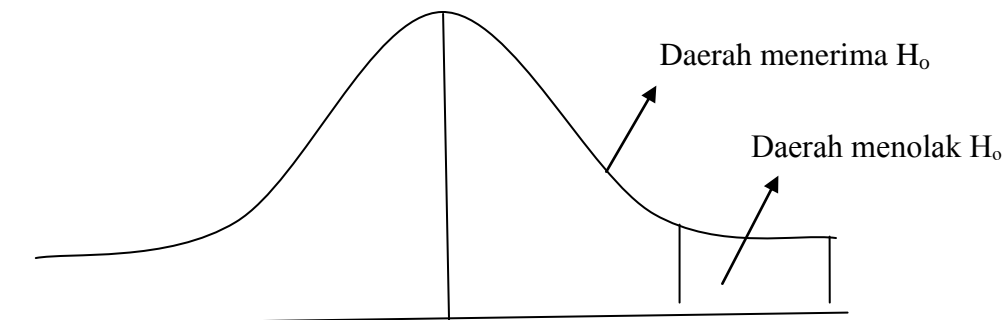
dimana :

b_j : Koefisien regresi

$se(b_j)$: standart error koefisien regresi

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t Tabel. Apabila t hitung > t Tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t Tabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

Gambar 3.2
Pengujian Hipotesis secara searah (one tail test) $\alpha=0,05$



Sumber : Gujarati 1995

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum(Y_1 - Y)^2}{\sum(Y_1 - Y)^2}$$

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1) Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas dan sangat terbatas.

Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linear tidak bias. Dengan terpenuhi asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu :

- a. Distribusi kesalahan adalah normal
- b. Nonmultikolinearitas, berarti antara variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi tidak terjadi hubungan yang mendekati sempurna ataupun hubungan yang sempurna
- c. Nonautokorelasi, berarti tidak ada pengaruh dari variabel dalam modelnya melalui selang waktu atau tidak terjadi korelasi diantar galat randomnya.
- d. Homoskedastisitas, berarti varians dari variabel bebas adalah sama atau konstan untuk setiap nilai tertentu dari variabel bebas lainnya atau variansi residu sama untuk semua pengamatan.

Penyimpangan dari nonmultikolinearitas dikenal sebagai multikolinearitas, penyimpangan nonautokorelasi dikenal sebagai autokorelasi, dan penyimpangan terhadap homoskedastisitas dikenal sebagai heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terjadi atau tidak penyimpangan terhadap asumsi klasik dalam model regresi yang dipergunakan, maka dilakukan beberapa cara pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot. Bila histogram hampir menyerupai genta dan titik *variance* semuanya mengikuti arah garis diagonal menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak pakai.

b. Uji Autokorelasi dan gejalanya

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang Gujarati (1995:15) konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variansi dan standart error terlalu rendah. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali,2005:31). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji formal untuk mendeteksi autokorelasi adalah breusch-Godfrey atau dengan nama lain uji *Langrange-Multilplier*. Deteksi gejala autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistic *Durbin-Watson de Statistic Test* dan mekanisme tes DW sebagai berikut:

- 1) Jika hipotesis H_0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka :
 - $d < d_L$: menolak H_0
 - $d < d_L$: tidak menolak H_0
 - $d_L \leq d \leq d_U$: pengujian tidak menyakinkan
- 2) Jika hipotesis nol H_0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka
 - $d < 4 - d_L$: menolak H_0
 - $d < 4 - d_U$: tidak menolak H_0
 - $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: pengujian tidak menyakinkan

3) Jika H_0 adalah 2 ujung yaitu bahwa tidak ada serial korelasi positif atau negatif, maka :

$d < d_L$: menolak H_0

$d > 4 - d_L$: menolak H_0

$d_U < d < 4 - d_U$: tidak menolak H_0

d_L dan d_U : pengujian tidak menyakinkan

$4 - d_L$ dan $4 - d_U$: pengujian tidak menyakinkan

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2001:14). Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi heteroskedastisitas yaitu setiap variabel penjelas memiliki varians yang sama (konstan). Heteroskedastisitas lebih sering muncul pada data cross section dibandingkan data time series. Untuk menguji model regresi yang digunakan terdapat heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan Uji Park, Uji White, Uji Glejtsler, dan Uji Breusch-Pagan-Godfrey (Gujarati, 2003 : 403-414). Dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White yang tersedia dalam program *eviews*.

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan (independen) dari model regresi (Damodar Gujarati. 1997:157). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Imam Ghazali, 2005 : 91). Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika

R² regresi persamaan utama lebih besar dari R² auxiliary regressions maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak sesuai dengan masalah yang dibahas maka definisi variabel operasional dan pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah kabupaten/kota dalam satu tahun atas dasar harga Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember tahun 2006-2009 yang diterbitkan oleh kantor BPS dan dinyatakan dalam milyar rupiah
2. Pajak Reklame adalah jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember tahun 2006-2009 diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS) dan dinyatakan dalam milyar rupiah
3. Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Jember. Data diukur dalam jumlah satuan orang
4. Jumlah Industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kabupaten Jember. Data jumlah industri diukur dalam jumlah satuan unit

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, yang terdapat Pulau Nusa Barong. Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 Km², dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76%.

Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas :

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur;
- 2) Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- 3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang;
- 4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa;
- 5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan

kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.

Kawasan budidaya terdiri dari :

- 1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota;
- 2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa;
- 3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari;
- 4) Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji;
- 5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi;
- 6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumbersari dan Arjasa;
- 7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.

4.1.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan pada hasil registrasi penduduk tahun 2001-2011, jumlah penduduk Kota Jember semakin tahun semakin meningkat. (lihat tabel 4.1)

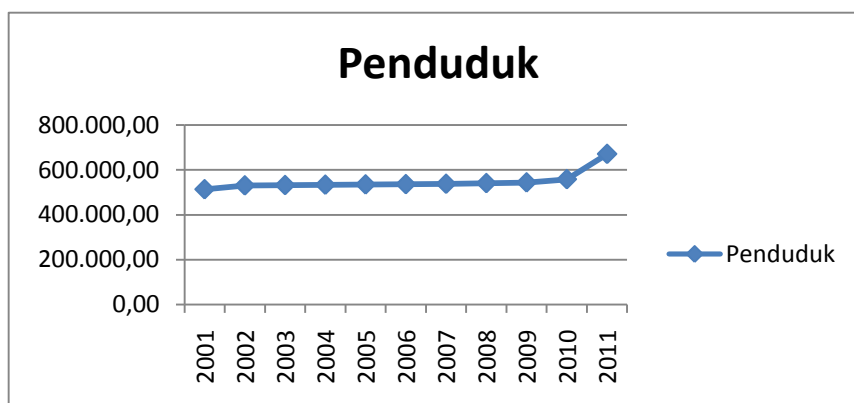
Tabel 4.1

Jumlah penduduk tahun 2001-2011

No	Tahun	Penduduk	Laju Pertumbuhan
1	2001	513.605,50	-
2	2002	530.626,90	3,20%
3	2003	532.135,90	0,28%
4	2004	533.714,40	0,29%
5	2005	534.947,90	0,23%
6	2006	536.164,30	0,22%
7	2007	537.785,30	0,30%
8	2008	540.790,90	0,55%

9	2009	543.916,90	0,57%
10	2010	558.286,00	2,57%
11	2011	670.410,30	16,72%

Sejalan dengan kenaikan penduduk, maka kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan. Disisi lain persebaran penduduk masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, Kota Jember dikategorikan dalam kelas kota sedang Karena berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, kota padat penduduk adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Kenaikan yang paling tinggi pada tahun 2011 dimana jumlah penduduknya mencapai 670.410,30 itu artinya perekonomian di Kabupaten Jember juga semakin meningkat. Jika di gambarkan penduduk Jember meningkat secara signifikan dilihat dari grafik 4.1



Grafik Jumlah Penduduk 4.1

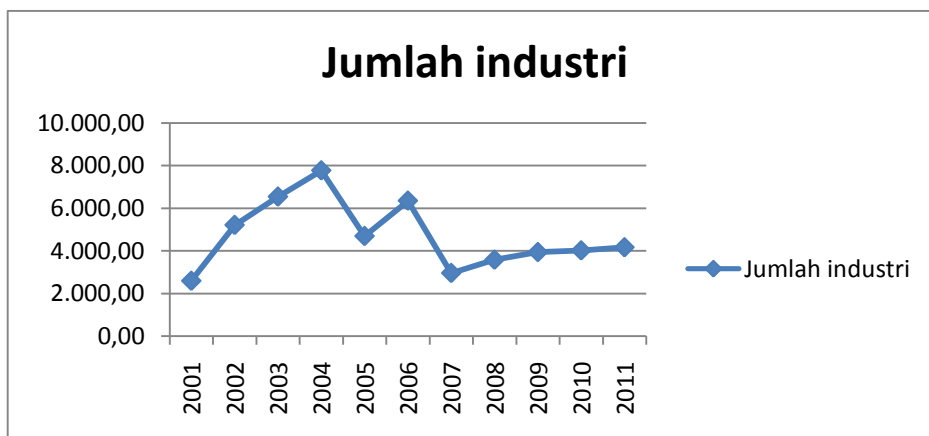
4.1.3 Jumlah Industri

Potensi di sektor industri dan perdagangan memiliki peran yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Hasil industri kecil, menengah dan besar berbasis agro dan nonagro serta kegiatan perdagangan baik lokal, regional maupun ekspor menjadi motor penggerak dalam membentuk Jember sebagai "magnet ekonomi" bagi daerah sekitarnya. (lihat dari Tabel 4.2)

No	Tahun	Jumlah industri	Laju Pertumbuhan
1	2001	2.591,00	-
2	2002	5.209,00	50,25%
3	2003	6.538,00	20,32%
4	2004	7.768,00	16,06%
5	2005	4.690,00	-65,62%
6	2006	6.348,00	26,11%
7	2007	2.957,00	-114,68%
8	2008	3.579,00	17,38%
9	2009	3.936,00	9,07%
10	2010	4.015,00	1,97%
11	2011	4.162,00	3,53%

Jumlah Industri Tabel 4.2

Dilihat dari table diatas Industri yang paling menonjol yaitu pada Tahun 2004 sebesar 7.768, perkembangan industry disini mengalami fluktuasi, itu disebabkan perekonomian di Kabupaten Jember tidak stabil sehingga mempengaruhi naik turunnya Industri. Dapat di lihat grafik 4.2



Grafik Jumlah Industri 4.2

Dilihat dari grafik Jumlah industry 4.2, industry yang paling meningkat secara pesat yaitu pada tahun 2004 lalu melonjak turun pada tahun 2005. Grafik ini berfluktuasi ketidaktetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya.

5 Pajak Reklame

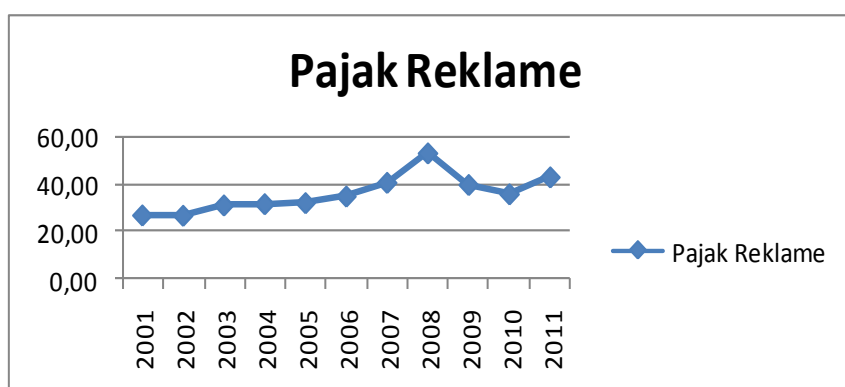
Pajak merupakan kontribusi terbesar pada penerimaan PDRB. Sama seperti di Kabupaten Jember penerimaan yang paling besar yaitu pajak, ada 7 macam pajak yang di punggut Pajak Restoran & Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dari Tahun ke Tahun Penerimaan pajak reklame berfluktuasi (lihat dari tabel 4.3)

Penerimaan pajak reklame Tabel 4.3

No	Tahun	Pajak Reklame	Laju Pertumbuhan
1	2001	26,84	-
2	2002	26,69	-0,56%
3	2003	31,06	14,07%
4	2004	31,59	1,68%
5	2005	32,03	1,37%
6	2006	34,81	7,99%
7	2007	40,59	14,24%
8	2008	53,03	23,46%
9	2009	39,69	-33,61%
10	2010	35,75	-11,02%
11	2011	42,91	16,69%

Dari Tabel 4.3 penerimaan pajak reklame dikatakan berfluktuasi sebab penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2008 sedangkan turun drastic pada tahun 2009 sampai 2010 lalu meningkat pada tahun 2011 ini artinya pemerintah Kota Jember harus Lebih menyorot pelaksanaan atau realisasi penerimaan pajak reklame sehingga semakin tahun penerimaan pajak reklame menjadikan prioritas dalam meningkatkan PDRB di Kabupaten Jember. Bisa dilihat Grafik 4.3

Grafik 4.3



Keadaan Pajak reklame di Kabuptaen jember perlu di sorot lagi supaya PDRB di Kabupaten Jember semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Jember akan berjalan.

6 Pertumbuhan Ekonomi

Tentunya nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung pengaruh berubahnya harga, sehingga masih belum bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2001-2011. (lihat Tabel 4.4)

Tabel 4.4 Penerimaan PDRB 2001-2011

No	Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan
1	2001	1.241.353,00	-
2	2002	3.410.455,00	63,60 %
3	2003	1.198.374,00	-184,59 %
4	2004	1.740.723,00	31,16 %
5	2005	1.897.001,00	8,24 %
6	2006	2.075.151,00	8,58 %
7	2007	2.257.870,00	8,09 %
8	2008	2.393.733,00	5,67 %
9	2009	2.530.786,00	5,41 %
10	2010	3.670.685,00	31,05 %
11	2011	2.828.441,00	-29,78 %

Sumber : BPS Kabupaten Jember, diolah

Dalam kegiatan pembangunan diberbagai bidang, akan ditingkatkan dan disempurnakan dengan mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja yang mengarah pada pembagian pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus mengutamakan atau memprioritaskan kepada bidang-bidang pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan segi pemerataan produksi dan stabilisasi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Jember menurut harga konstan dapat ditunjukkan oleh adanya

kenaikan Produk Domestik Regional Bruto. Dalam Tabe 4.4 disajikan mengenai PDRB Kota Jember tahun 2001-2011 atas dasar harga konstan 2000, pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 3.670.685,00

4.2 Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, jumlah industri, penerimaan pajak reklame, dan penerimaan PDRB di Kabupaten Jember. Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
PDRB	1198373,69	4953666,31	2317310,27	849259,94
PDK	513606,00	795363,00	556806,61	59042,81
ID	1218,00	8789,00	4677,02	1729,79
RE	16,81	64,47	36,59	9,88

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jember tahun 2001 sampai dengan 2011 memiliki rata-rata 2.317.310 jiwa. Rata-rata jumlah industri dari tahun 2001 sampai dengan 2011 adalah sebanyak 4.677 industri. Rata-rata penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 sampai dengan 2011 adalah sebanyak Rp. 36,59 Milyar. Rata-rata penerimaan PDRB dari tahun 2001 sampai dengan 2011 adalah sebanyak Rp. 2.317.310,27 Milyar.

4.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah dan regresi linier berganda (*Multiple Regression Model*) dengan menggunakan uji model klasik (*OLS-Ordinary Least Square*). Hasil analisis dapat dinyatakan sebagai berikut.

4.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak reklame di Kabupaten Jember. Adapun hasil dari pengujian dengan regresi linier berganda secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Keterangan	Koef. Regresi	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	14.050	1.053	0.299
PDK	7,130	0.253	0,802
ID	0.002	2.083	0.044
PDRB	4.73006	2.421	0.020
	R	=	0,541
	<i>R Square</i>	=	0,239
	F_{hitung}	=	5.510
	F_{sig}	=	0,003

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel-variabel jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB, apakah variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh positif atau negatif. Jika positif menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame akan berubah searah dengan perubahan variabel bebasnya, sedangkan bila berpengaruh negatif maka perubahan penerimaan Pajak Reklame ke arah yang berlawanan dengan perubahan variabel bebasnya.

Berdasarkan hasil analisis didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14.050 + 7,130 \text{ PDK} + 0.002 \text{ ID} + 4.73006 \text{ PDRB}$$

Adapun interpretasi dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 14.050 artinya apabila jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB sama dengan nol, maka besarnya penerimaan pajak Reklame akan mengalami peningkatan menjadi Rp. 14.050.
- 2) $b_1 = 7,130$, artinya apabila jumlah industri dan penerimaan PDRB konstan, maka kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 orang akan meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 7,130.
- 3) $b_2 = 0.002$, artinya apabila jumlah penduduk dan penerimaan PDRB konstan, maka kenaikan jumlah industry sebesar 1 buah akan meningkatkan penerimaan Pajak reklame sebesar Rp. 0.002.

- 4) $b_3 = 4.73006$, artinya apabila jumlah penduduk dan jumlah industri konstan, maka kenaikan penerimaan PDRB sebesar Rp. 1 akan meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 4.730.060.

Nilai koefisien determinasi berganda (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui besarnya sumbangan dari variabel-variabel bebas terhadap variabel-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Apabila R^2 atau $R^2 = 1$, maka garis regresi dari model tersebut memberikan sumbangan sebesar 100% terhadap perubahan variabel terikat. Apabila $R^2 = 0$, maka model tersebut tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel terikat. Kecocokan model akan semakin lebih baik apabila mendekati satu.

Berdasarkan hasil analisis yang bisa dilihat pada tabel 4.6 diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,541, hal ini berarti 54.1% perubahan penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, jumlah industri, dan penerimaan PDRB sedangkan sisanya sebesar 45.9% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

4.3.2 Pengujian Statistik

Uji statistik dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kenyataan. Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan akan diuji dengan uji t.

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai probabilitas t_{hitung} dengan *level of significance* ($\alpha = 5\%$). Masing-masing variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) apabila nilai probabilitas $t_{hitung} \leq \text{level of significance}$ ($\alpha = 5\%$).

Hasil perhitungan uji t dengan menggunakan program *SPSS for Windows* dapat dilihat pada tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel jumlah penduduk (X_1) terhadap penerimaan Pajak Reklame (Y)

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 7,130 dan tingkat probabilitas t_{hitung} sebesar 0,802. Karena tingkat probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka H_{a1} di tolak, berarti secara parsial variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember terbukti kebenarannya atau H_{a1} di tolak.

2. Pengaruh variabel jumlah industri (X_2) terhadap penerimaan Pajak Reklame (Y)

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 0.002 dan tingkat probabilitas t_{hitung} sebesar 0.044. Karena tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H_{a2} diterima, berarti secara parsial variabel jumlah industri mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Jumlah Industri Industri Makanan dan Minuman berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember terbukti kebenarannya atau H_{a2} diterima.

3. Pengaruh variabel penerimaan PDRB (X_4) terhadap penerimaan Pajak Reklame (Y)

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 4.73006 dan tingkat probabilitas t_{hitung} sebesar 0.020. Karena tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H_{a3} diterima, berarti secara parsial variabel penerimaan PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember terbukti kebenarannya atau H_{a3} diterima.

4.4 Uji Asumsi Klasik

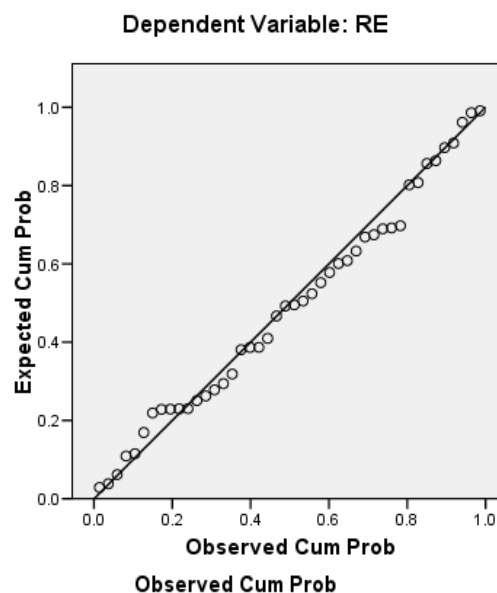
Sebelum menguji lebih lanjut hasil estimasi regresi, agar hasil yang diberikan memenuhi persyaratan BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*) perlu

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot. Secara ringkas hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 sebahai berikut

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Lampiran 3

Dari grafik hasil uji normalitas terhadap model regresi yang dapat dilihat pada lampiran 3, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji asumsi bahwa data haruslah bersifat bebas dalam pengertian bahwa data pada periode sebelumnya ataupun pada periode sesudahnya. Menurut Gujarati (1999) pengujian autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi diantara anggota serangkaian data penelitian yang diruntut waktu (*time series*) atau menurut ruang (*cross section*). Pada data yang diruntut waktu, memang kemungkinan kecenderungan untuk terjadinya gejala ini sangat besar. Sedangkan pada data *cross section* memang ada kemungkinan data disuatu tempat mempengaruhi atau dipengaruhi di tempat lainnya.

Apabila terjadi gejala autokorelasi merupakan suatu masalah yang cukup pelik, karena uji F dan uji t sudah tidak efektif lagi. Dan bilamana uji tetap dilaksanakan, maka kesimpulan yang didapat akan bersifat meragukan. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan pengujian uji statistik Durbin Watson, dimana besarnya dilambangkan dengan d atau DW. Dapat dilihat pada lampiran 3 bahwa pada penelitian ini didapat nilai DW sebesar 1,841 yang berarti terletak diantara $dU < d < 4 - dU$ ($1,659 < 1,841 < 2,341$). Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah uji *glejser* yang dilakukan dengan cara melakukan regresi varian gangguan (residual) dengan variabel bebasnya sehingga didapat nilai P. Untuk mengetahui adanya gejala gangguan atau tidak adalah apabila nilai $P > 0,05$, berarti menunjukkan tidak terjadi gangguan dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser*

Variabel	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
PDK	-1.670	0,101	Non Heteroskedastisitas
ID	1.503	0,141	Non Heteroskedastisitas
PDRB	1.705	0,096	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran4

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa t statistik menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dimana variabel dependen yaitu e_i atau *error absolut*, hal ini

dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi untuk masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (1999) multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas dari model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana $VIF > 10$ berarti terjadi multikolinieritas (Hakim, 2000).

Adapun nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai VIF	Keterangan
PDK	1,630	Non multikolinieritas
ID	1,035	Non multikolinieritas
PDRB	1,590	Non multikolinieritas

Sumber: Lampiran3

Berdasarkan hasil pengujian yang tercermin dalam Tabel 4.8 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, karena didapat nilai $VIF < 10$, artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri, dan penerimaan PDRB terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.

Hasil regresi secara parsial melalui uji t memperoleh hasil bahwa variable jumlah industri dan penerimaan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame daerah di Kabupaten Jember.

Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Industri maka penerimaan Pajak Reklame juga akan semakin besar. Semakin Banyak Industri-industri yang bermunculan maka kegiatan Promosi akan barang-barang juga akan semakin meningkat dan permintaan akan pemasangan reklame juga akan meningkat ini membuktikan bahwa Meningkatnya jumlah Industri maka juga akan meningkatkan Pajak Reklame. Semakin meningkat jumlah industri maka kebutuhan akan barang dan jasa juga akan meningkat dan lapangan pekerjaan juga akan bertambah sehingga pengangguran dapat di atasi sedangkan grafiknya akan naik.

Menurut Sofian (1997:18), Industri merupakan salah satu faktor yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan Industri dianggap sebagai salah satu faktor yang positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Jember yang mulai menunjukkan pertumbuhannya, banyaknya jumlah Industri akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari produksi inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula ekonomi secara keseluruhan bukan pada pendapatan daerah saja namun pendapatan pemerintah juga harus dikembangkan, dengan adanya jumlah Industri yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik, jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah.

Jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pajak Reklame daerah di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka penerimaan Pajak Reklame juga akan semakin besar. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sutrisno (2002:24) jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh devas, dkk (1989), bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan

reklame juga sangat berpengaruh dengan pendapatan Pajak Reklame, hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan suatu memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat, hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan objek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat.

Jumlah penerimaan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Reklame di daerah di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penerimaan PDRB maka penerimaan Pajak Reklame juga akan semakin besar. PDRB merupakan jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga konstan. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

Produk Domestik regional bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik perkapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan. Atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993;27).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.
- b. Jumlah Industri Makanan dan Minuman berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.
- c. Penerimaan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.
- d. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel penerimaan Pajak Reklame secara berturut – turut adalah variabel jumlah penduduk, variabel jumlah industri, dan yang terakhir adalah variabel PDRB Perkapita

5.2 Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk. Sehingga akan lebih baik apabila digunakan pendekatan lain untuk mengukur pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame, seperti dengan melihat taraf hidup penduduk.
- b) .Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame hendaknya diciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri dengan meningkatnya jumlah industri diharapkan pemasangan reklame juga akan meningkat.

- c) PDRB Perkapita menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat semakin baik maka akan menimbulkan potensi pasar, sehingga menarik minat perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasanya di daerah tersebut.
- d) Pemerintah Kabupaten Jember bersama-sama dengan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatnya jumlah objek reklame di Kabupaten Jember maka realiasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jember akan meningkat sehingga penerimaan PAD juga meningkat. Maka dengan adanya peningkatan penerimaan PAD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Jember .

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofir, 2000. *Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah*. Berita Pajak No. 15 Januari 2000. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Timur Dalam Angka berbagai Edisi* : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI, Press, Jakarta.
- Dumairy(1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Erlangga
- Gujarati, Darmodar, 1995, *Ekonometrika Dasar, Terjemahan Sumarno Zein*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Jaka Sriyana, 1999, *Hubungan keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 4 No. 1 hal 312-323.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta : Rajawali Press
- J. Supranto. 1996. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Erlangga
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grasindo persada
- Kuncoro, Mudrajad, (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lincoln, Arsyad, 1999, *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Munawar Ismail, 2001. *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

- Muqodim, Perpajakan Buku Satu, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Musgrave, 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, edisi V*, Erlangga, Jakarta.
- Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
- Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
- Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subroto K, Usman B. 1980. *Pajak-pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Sudarsono, 1988, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sugiono, (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sunarto, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Suparmoko, 1986, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Sutrisno P.H, 2002, *Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, BPFE, Yogyakarta.
- Syuhada Sofian, 1997, *Prospek dan Alternatif "Action Plan" Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang*, Gema Stikubank, Semarang.
- Thomas Sumarsan, 2010, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame

Waluyo da Ilyas, Wirawan B,2007, Perpajakan Indonesia, edisi ke 7, Penerbit Salemba empat, Jakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Tahun	Tahun	RE	ID	PDK	PDRB
2001	2001.1	26,84	2,591.00	513,605.50	1,241,353.00
	2001.2	27,78	2,662.00	524,547.50	1,270,371.00
	2001.3	28,72	2,733.00	535,489.50	1,299,389.00
	2001.4	29,66	2,804.00	546,431.50	1,328,407.00
2002	2002.1	26,69	5,209.00	530,626.90	3,410,455.00
	2002.2	26,06	6,213.00	530,870.30	1,460,685.00
	2002.3	25,44	7,218.00	531,113.70	1,510,915.00
	2002.4	24,81	8,222.00	531,357.10	3,561,145.00
2003	2003.1	31,06	6,538.00	532,135.90	1,198,374.00
	2003.2	33,19	6,647.00	532,593.50	1,503,403.00
	2003.3	35,31	6,655.00	533,051.00	1,508,432.00
	2003.4	37,44	6,664.00	533,508.60	1,513,462.00
2004	2004.1	31,59	7,768.00	533,714.40	1,740,723.00
	2004.2	30,53	6,775.00	534,071.30	1,834,646.00
	2004.3	29,47	6,782.00	534,428.20	1,928,568.00
	2004.4	28,41	8,789.00	534,785.10	2,022,490.00
2005	2005.1	32,03	4,690.00	534,947.90	1,897,001.00
	2005.2	32,84	4,934.00	535,227.10	1,903,158.00
	2005.3	33,66	4,978.00	535,506.40	1,909,316.00
	2005.4	34,47	5,023.00	535,785.60	1,915,473.00
2006	2006.1	34,81	6,348.00	536,164.30	2,075,151.00
	2006.2	35,44	3,304.00	536,483.30	2,142,716.00
	2006.3	36,06	2,261.00	536,802.30	2,210,282.00

	2006.4	36,69	1,218.00	537,121.30	1,277,847.00
2007	2007.1	40,59	2,957.00	537,785.30	2,257,870.00
	2007.2	42,53	3,026.00	538,242.30	2,290,418.00
	2007.3	44,47	3,096.00	538,699.30	2,322,966.00
	2007.4	46,41	3,165.00	539,156.30	2,355,514.00
2008	2008.1	53,03	3,579.00	540,790.90	2,393,733.00
	2008.2	56,84	5,786.00	541,719.00	3,928,549.00
	2008.3	60,66	3,993.00	542,647.00	2,463,365.00
	2008.4	64,47	4,201.00	543,575.10	3,498,181.00
2009	2009.1	39,69	3,936.00	543,916.90	2,530,786.00
	2009.2	32,06	3,954.00	544,610.50	2,564,718.00
	2009.3	24,44	3,972.00	545,304.00	2,598,650.00
	2009.4	16,81	3,991.00	545,997.60	2,632,582.00
2010	2010.1	35,75	4,015.00	558,286.00	3,670,685.00
	2010.2	38,75	4,035.00	563,617.50	2,706,286.00
	2010.3	41,75	4,056.00	568,949.00	2,741,886.00
	2010.4	44,75	4,076.00	574,280.50	2,777,487.00
2011	2011.1	42,91	4,162.00	670,410.30	2,828,441.00
	2011.2	43,97	4,208.00	712,061.10	2,870,183.00
	2011.3	45,03	4,254.00	753,711.90	3,911,924.00
	2011.4	46,09	4,301.00	795,362.70	4,953,666.00

Lampiran 2**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDK	44	505998.00	795363.00	555897.5	59519.11979
ID	44	1218.00	7978.00	4965.6591	1814.79461
PDRB	44	1198374	4953666	2317310	849259.93585
RE	44	16.81	64.47	36.5909	9.88475
Valid N (listwise)	44				

Lampiran 3

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
RE	36.5909	9.88475	44
PDK	555897.5	59519.11979	44
ID	4965.6591	1814.79461	44
PDRB	2317310	849259.93585	44

Correlations

		RE	PDK	ID	PDRB
Pearson Correlation	RE	1.000	.341	.326	.458
	PDK	.341	1.000	.181	.609
	ID	.326	.181	1.000	.090
	PDRB	.458	.609	.090	1.000
Sig. (1-tailed)	RE	.	.012	.015	.001
	PDK	.012	.	.120	.000
	ID	.015	.120	.	.280
	PDRB	.001	.000	.280	.
N	RE	44	44	44	44
	PDK	44	44	44	44
	ID	44	44	44	44
	PDRB	44	44	44	44

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB ^a , ID, PDK	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: RE

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	.541 ^a	.292	.239	8.62096	.292	5.510	3	40	.003	1.841

a. Predictors: (Constant), PDRB, ID, PDK

b. Dependent Variable: RE

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1228.611	3	409.537	5.510	.003 ^a
	Residual	2972.841	40	74.321		
	Total	4201.452	43			

a. Predictors: (Constant), PDRB, ID, PDK

b. Dependent Variable: RE

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.050	13.346		1.053	.299					
	PDK	7.13E-006	.000	.043	.253	.802	.341	.040	.034	.613	1.630
	ID	.002	.001	.282	2.083	.044	.326	.313	.277	.967	1.035
	PDRB	4.73E-006	.000	.406	2.421	.020	.458	.358	.322	.629	1.590

a. Dependent Variable: RE

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PDK	ID	PDRB
1	1	3.835	1.000	.00	.00	.01	.00
	2	.106	6.006	.00	.00	.59	.30
	3	.055	8.367	.06	.02	.40	.41
	4	.004	30.799	.94	.98	.00	.29

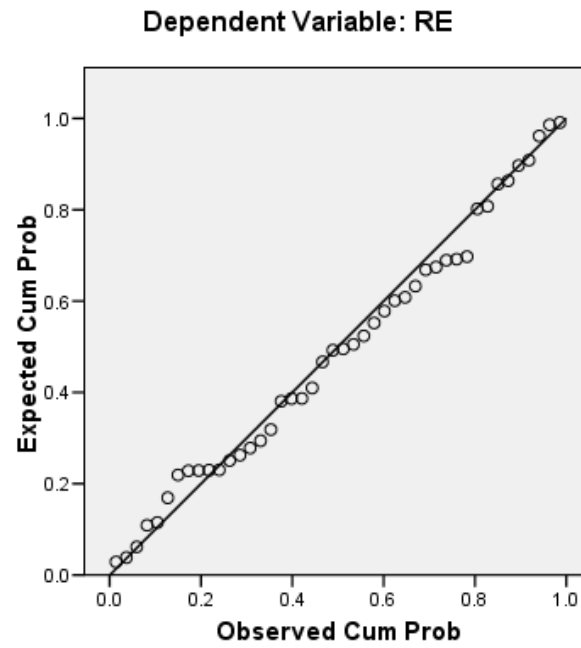
a. Dependent Variable: RE

Residuals Statistics^a

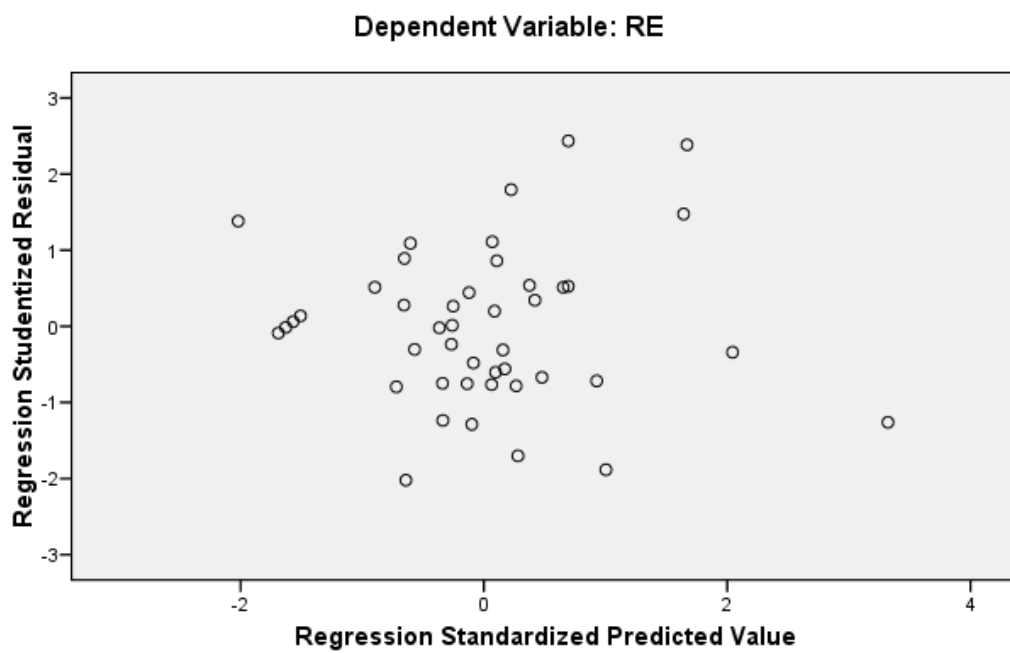
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.7919	54.3450	36.5909	5.34531	44
Std. Predicted Value	-2.020	3.321	.000	1.000	44
Standard Error of Predicted Value	1.399	5.608	2.437	.915	44
Adjusted Predicted Value	23.6448	60.3992	36.7272	5.90473	44
Residual	-16.34976	20.36181	.00000	8.31480	44
Std. Residual	-1.897	2.362	.000	.964	44
Stud. Residual	-2.021	2.436	-.007	1.023	44
Deleted Residual	-18.55893	22.31181	-.13630	9.40526	44
Stud. Deleted Residual	-2.106	2.607	-.002	1.053	44
Mahal. Distance	.155	17.216	2.932	3.288	44
Cook's Distance	.000	.291	.035	.067	44
Centered Leverage Value	.004	.400	.068	.076	44

a. Dependent Variable: RE

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Lampiran 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Abs_Res	6.2264	5.27536	44
PDK	555897.5	59519.11979	44
ID	4965.6591	1814.79461	44
PDRB	2317310	849259.93585	44

Correlations

		Abs_Res	PDK	ID	PDRB
Pearson Correlation	Abs_Res	1.000	-.083	.198	.146
	PDK	-.083	1.000	.181	.609
	ID	.198	.181	1.000	.090
	PDRB	.146	.609	.090	1.000
Sig. (1-tailed)	Abs_Res	.	.297	.099	.172
	PDK	.297	.	.120	.000
	ID	.099	.120	.	.280
	PDRB	.172	.000	.280	.
N	Abs_Res	44	44	44	44
	PDK	44	44	44	44
	ID	44	44	44	44
	PDRB	44	44	44	44

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB ^a , ID, PDK	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Abs_Res

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.343 ^a	.118	.052	5.13701

a. Predictors: (Constant), PDRB, ID, PDK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	141.111	3	47.037	1.782	.166 ^a
	Residual	1055.555	40	26.389		
	Total	1196.666	43			

a. Predictors: (Constant), PDRB, ID, PDK

b. Dependent Variable: Abs_Res

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.030	7.952		1.764	.085
	PDK	-2.8E-005	.000	-.318	-1.678	.101
	ID	.001	.000	.227	1.503	.141
	PDRB	1.98E-006	.000	.319	1.705	.096

a. Dependent Variable: Abs_Res